

**PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLA BUMDES
DI KECAMATAN KAIRATU dan KAIRATU BARAT
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

¹Elsina Huberta Aponno, ²Shirley Hutubessy

¹Administrasi Niaga Politeknik Negeri Ambon, ²Balai Latihan Masyarakat Ambon
¹elslatumaerissaponno@yahoo.com

ABSTRAK

Kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari BUMDes bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggota. Kondisi riil BUMDes di Propinsi Maluku pada umumnya dan Kabupaten Seram Bagian Barat pada khususnya masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak masalah dalam pengelolaan BUMDes yang masih harus mendapatkan perhatian berbagai pihak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya untuk turut memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi BUMDes pada umumnya antara lain kapasitas pengurus yang belum cukup memadai serta pengetahuan manajerial yang minim. Kegiatan dalam bentuk pelatihan ini dilakukan melalui tahapan input, proses dan output. Inputnya adalah pengelola BUMDes yang di-proses melalui *pre test*, peta harapan, penyajian materi, dan *post test*, sehingga diharapkan bisa menghasilkan *output* berupa pengelola BUMDes yang kompeten dalam hal pelebagaan dan pengelolaan BUMDes. Metode pelatihan dilakukan dalam bentuk metode ceramah, diskusi (tanya jawab), praktek, presentase kelompok, dan permainan. Hasil kegiatan ini adalah pengelola BUMDes yang lebih memahami konsep dasar BUMDes, mampu mengaplikasikan perencanaan unit usaha dengan menggunakan analisa bisnis kanvas, mampu mengaplikasikan manajemen strategi dengan menggunakan analisa SWOT, mampu mengaplikasikan strategi pemasaran dengan menggunakan analisa *marketing mix*, yang mampu mengaplikasikan sistim akuntansi sederhana, mampu membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut, serta mampu membuat proposal unit usaha.

Kata kunci: Pelebagaan BUMDes 1; Pengelolaan BUMDes 2;

I. PENDAHULUAN

I.1. Analisis Situasi

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan, desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk, tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa (Prasetyo, 2016). Namun realitanya Desa justru terabaikan di mana selama ini pengembangan ekonomi dan pembangunan dipusatkan di kota. Hal itu menimbulkan kesenjangan antara Desa dan Kota. Desa tidak diberi keleluasaan mengolah potensi yang dimilikinya, yang terjadi justru potensi Desa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi perkotaan. (Nugraha dan Kismartini, 2019). Selain itu, pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan yang antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan (Prasetyo, 2016).

Pemenuhan kesejahteraan umum dan ekonomi desa harus menjadi tulang punggung yang dibangun dengan kokoh. Pembangunan ketahanan ekonomi desa membutuhkan kesadaran dan upaya bersama semua komponen di setiap tingkat makro, meso, mikro, bahkan pada setiap tingkat yang dapat secara unik didefinisikan. Bukan saja ketahanan ekonomi namun juga bagaimana pembangunan mampu mendefinisikan kesejahteraan adaptif desa sebagai kesejahteraan yang sesuai dengan kearifan lokal desa tersebut (Fatimah, 2018)

Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimuli dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Agar keberadaan lembaga ekonomi ini tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama di mana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat (Kartika et. all., 2017). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga yang diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut. BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa (Faedlulloh, 2018), berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Zulkarnaen, 2016).

Gagasan tentang pembentukan BUMDes sebenarnya sudah tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun baru pada tahun 2010 mekanisme pembentukan dan operasionalisasi BUMDes dijelaskan oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2015 kemudian diperbaharui dengan Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Nugraha dan Kismartini, 2019)

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Zulkarnaen, 2016). Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kirowatidan dan Lutfiyah, 2018)

Kondisi ideal yang diharapkan terjadi dari BUMDes bukan hanya sebagai bentuk lembaga sosial saja tapi menjadi lembaga ekonomi yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan anggota. Peranan-peranan pemberdayaan ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang memerlukan bantuan modal usaha agar bisa memiliki usaha sendiri dengan begitu mereka bisa meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan hidupnya. Peran pengurus BUMDes memberikan pemberdayaan kepada seluruh anggotanya mulai dari tahapan persiapan, tahapan (penilaian), tahapan perencanaan alternatif program/kegiatan, tahapan pemformulasian program, tahapan pelaksanaan, tahap evaluasi dan tahap terminasi. Pada tahapan-tahapan tersebut masyarakat dilibatkan secara langsung yaitu supaya masyarakat mengerti akan masalah yang dihadapi serta dapat mengentaskan permasalahan mereka sendiri sampai mereka mandiri (Fifianti et. all., 2018).

BUMDes dibangun dengan tujuan untuk menggerakkan dan mengakselerasi perekonomian desa. Harapannya segala sumber daya yang dimiliki desa bisa dikelola oleh warga desa sendiri untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga desa bisa

mandiri. Namun BUMDes yang dirancang sebagai ujung tombak ekonomi desa banyak yang mati sebelum berkembang karena minimnya partisipasi warga. BUMDes perlu belajar dari gagalnya praktik institusi-institusi ekonomi desa sebelumnya (Faedlulloh, 2018).

Selain itu, permasalahan yang sering muncul dalam pendirian BUMDes adalah seringkali Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah mendorong pendirian BUMDes hanya untuk memenuhi target program kegiatan dengan digelontor bantuan dana. Seringkali mereka juga tidak mendampingi BUMDes di wilayahnya, sementara itu Pemerintahan Desa juga seringkali dalam mendirikan BUMDes kurang memperhatikan potensi, dan sarana prasarana yang ada di desa. Kapasitas pengurus yang belum cukup memadai serta pengetahuan manajerial yang minim juga jadi tantangan tersendiri. Alhasil BUMDes yang berdiri tidak berjalan maksimal sehingga pemasukan BUMDes tidak sesuai harapan bahkan mungkin malah merugi. Kalaupun sudah sesuai dengan potensi yang ada di desanya, seringkali yang menjadi penghalang berdirinya BUMDes adalah pemasaran yang tidak maksimal dari para pengelolanya (Nugraha dan Kismartini, 2019).

Hal ini juga yang menjadi masalah BUMDes di Maluku khususnya di Kabupaten Seram Bagian Barat. Banyak BUMDes yang pengurusnya sudah ada tapi belum ada SK ataupun dilantik sehingga aktivitas BUMDes belum berjalan. Ada juga BUMDes yang baru mau memulai aktivitas bila sudah ada dana dari desa, padahal BUMDes harus memulai proses dengan memutuskan unit usaha yang akan dijalankan, kemudian membuat proposal ke desa. Bila disetujui, desa akan mencairkan dana sesuai proposal tersebut. Masalah lainnya adalah masih minimnya pemahaman pengurus BUMDes tentang BUMDes itu sendiri serta kapasitas manajerial yang tidak memadai.

Berbagai upaya kemudian dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut terutama di wilayah propinsi Maluku, antara lain yang dilakukan Kemendes melalui Balai Latihan Masyarakat (BLM Ambon). Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dilakukan di tingkat kecamatan dengan menghadirkan pengurus BUMDes dari berbagai desa. Agar mencapai hasil maksimal, BLM Ambon melibatkan LSM yaitu Yayasan Hahessi serta akademisi dalam program pelatihan ini. Salah satu paket pelatihan dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang melibatkan 6 BUMDes di Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUMDes di Kecamatan Kairatu.

I.2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan

Pelatihan Badan Usaha Milik Desa melibatkan pengurus dari 6 BUMDes di Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUMDes di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pemahaman tentang konsep dasar BUMDes
2. Meningkatkan kesadaran pengelola dan peserta program pelatihan tentang pentingnya merencanakan usaha BUMDes.
3. Meningkatkan kemampuan pengelola dalam melaksanakan produk/jasa yang dihasilkan
4. Memberikan penguatan BUMDes di bidang pemasaran agar mampu bersaing dengan strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kemampuannya.
5. Memberikan kemampuan dalam mengelola proses produksi dan mengelola sumber daya manusia
6. Meningkatkan pengetahuan tentang konsep dasar akuntansi dalam pengelolaan usaha BUMDes.

II. METODE KEGIATAN

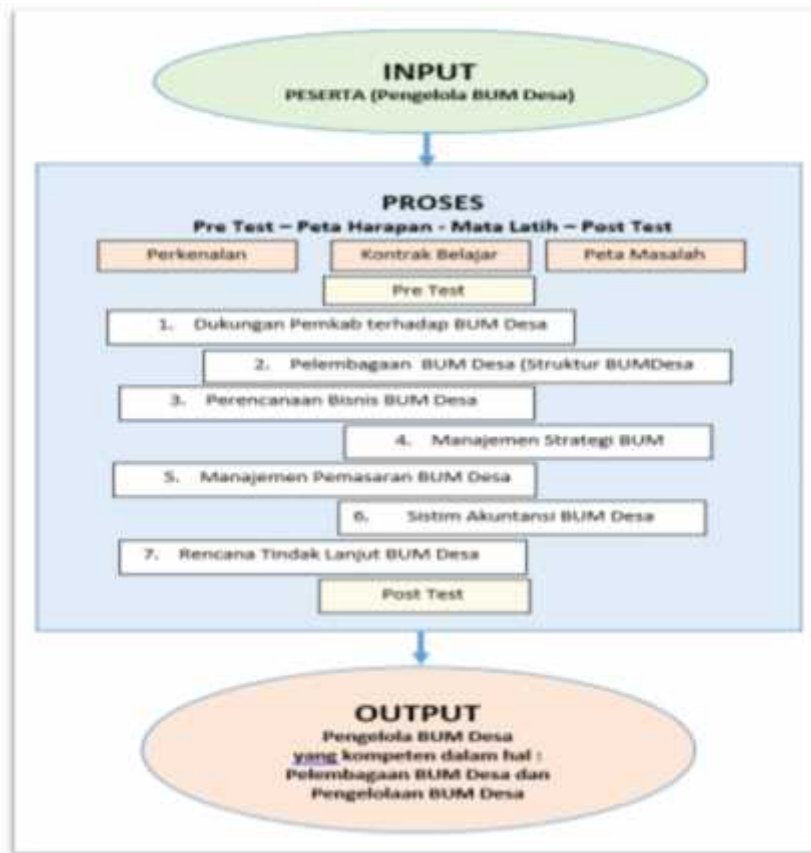
II.1. Peserta Pelatihan

Peserta dalam pelatihan sebanyak 40 orang yang adalah Pengurus dari 8 BUMDes di wilayah Kecamatan Kairatu Barat dan Kairatu, masing-masing sebanyak 5 orang yaitu :

1. BUMDes Makmur, Desa Waihatu, Kecamatan Kairatu Barat
2. BUMDes Urumese, Desa Lohiatala, Kecamatan Kairatu Barat
3. BUMDes Sarihalawane, Desa Waisarisa, Kecamatan Kairatu Barat
4. BUMDes Selumena, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat
5. BUMDes Zera, Desa Waesamu, Kecamatan Kairatu Barat
6. BUMDes Kwalitoi, Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat
7. BUMDes Waeaka, Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu
8. BUMDes Argem Wira Sejahtera, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu

II.2. Tahapan Pelatihan

Untuk mencapai tujuan, maka tahapan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : Tahapan Kegiatan

II.3. Metode Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan di Balai Kecamatan Kairatu Barat selama 4 hari dengan memaksimalkan waktu untuk praktek.

Aktivitas awal mendahului seluruh proses pembelajaran adalah:

- a. Perkenalan, dilakukan dalam bentuk permainan.
- b. Kontrak belajar, dilakukan dengan bersepakat tentang hal-hal yang menjadi tata tertib serta waktu belajar selama pelatihan.
- c. *Pre Test* sebagai aktivitas untuk mengukur seberapa jauh pemahaman awal peserta tentang BUM Desa sebelum mengikuti pelatihan.
- d. Peta harapan, merupakan aktivitas untuk mengidentifikasi harapan peserta dengan mengikuti kegiatan pelatihan ini. Peta harapan ini yang kemudian menjadi salah satu dasar pembobotan materi pelatihan.



Gambar 2. Peserta, Pemandu, dan Pemerintah Daerah



Gambar 3. Perkenalan



Gambar 4. Permainan

Pelatihan menggunakan metode ceramah, diskusi (tanya jawab), praktek, presentase kelompok, dan permainan. Permainan dilakukan setiap mengawali penyampaian materi untuk setiap mata latih.

Metode yang digunakan untuk setiap mata latih adalah sebagai berikut:

1. Materi : Dukungan Pemkab Terhadap BUM Desa
Pemandu : Sarfudin Hulom, SE. (Dinas PMD Kabupaten Seram Bagian Barat).
Metode : Ceramah dan tanya jawab.

Pada saat sesi ini berlangsung, Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten SBB masih berada di tempat pelatihan dan terlibat aktif menyampaikan materi.



Gambar 5. Materi “Dukungan Pemkab Terhadap BUMDes”

2. Materi : Pelembagaan BUMDes (Struktur BUMDesa).
Pemandu : Shirley Hutubessy, SH. (BLM Ambon).
Metode : Ceramah, tanya jawab, praktek “Membuat struktur organisasi BUMDes,
presentase kelompok.



Gambar 6. Materi “Pelembagaan BUMDes”

3. Materi : Merencanakan Usaha BUM Desa
Pemandu : Elsina H. Aponno (Yayasan Hahessi/Politeknik Negeri Ambon)
Metode : Ceramah, tanya jawab, praktek “Perencanaan usaha menggunakan Model Bisnis Kanvas”, presentase kelompok



Gambar 7. Presentase Kelompok “Model Bisnis Kanvas”

4. Manajemen Strategi BUM Desa

Pemandu : Elsina H. Aponno (Yayasan Hahessi/Politeknik Negeri Ambon)

Metode : Ceramah, tanya jawab, praktek “Manajemen Strategi menggunakan Analisa SWOT”, presentase kelompok.



Gambar 8. Diskusi Hasil Kerja Kelompok “Analisa SWOT”

5. Materi : Manajemen Pemasaran BUM Desa

Pemandu : Elsina H. Aponno (Yayasan Hahessi/Politeknik Negeri Ambon)

Metode : Ceramah, tanya jawab, praktek “Strategi pemasaran menggunakan *Marketing Mix*”, Presentase kelompok



Gambar 9. Diskusi Hasil Kerja Kelompok, “*Marketing Mix*”

6. Materi : Sistem Akuntansi BUM Desa

Pemandu : Elsina H. Aponno (Yayasan Hahessi/Politeknik Negeri Ambon)

Metode : : Ceramah, tanya jawab, praktek “Menyusun Neraca Laba Rugi”, pembahasan hasil praktek.



Gambar 10. Kerja Kelompok “Menyusun Neraca Laba Rugi”

7. Materi : Rencana Tindak Lanjut
Pemandu : Shirley Hutubessy, SH. (BLM Ambon)
Metode : Ceramah, tanya jawab, praktek “Menyusun Rencana Tindak Lanjut”,
presentase kelompok

III. HASIL KEGIATAN

III.1. Output

Output pelatihan ini adalah Pengelola 6 BUMDes di wilayah Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUMDes di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih :

1. Memahami konsep dasar BUMDes
2. Mampu mengaplikasikan perencanaan unit usaha dengan menggunakan analisa bisnis kanvas.
3. Mampu mengaplikasikan manajemen strategi dengan menggunakan analisa SWOT.
4. Mampu mengaplikasikan strategi pemasaran dengan menggunakan analisa *marketing mix*.
5. Mampu mengaplikasikan sistim akuntansi sederhana.
6. Mampu membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut.
7. Mampu membuat proposal unit usaha.

III.2. Outcome

Outcome pelatihan ini adalah :

1. Pengelolaan 6 BUM Desa di wilayah Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUM Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat menjadi lebih baik baik, terutama dari aspek manajerialnya.
2. Ada peningkatan pendapatan 6 BUM Desa di wilayah Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUM Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang mampu berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Sistem Keuangan 6 BUM Desa di wilayah Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUM Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat yang dapat mengikuti kaidah; kronologis, sistematis, informatif, dan *auditable*.

III.3. Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)

Di akhir pelatihan, peserta diminta untuk membuat Rencana Kerja Tindak Lanjut sebagai aksi nyata dalam penerapan hasil pelatihan dalam pengelolaan BUMDes di desa masing-masing. Rencana Kerja Tindak Lanjut dari 6 BUM Desa di wilayah Kecamatan Kairatu Barat dan 2 BUM Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat ini kemudian diserahkan kepada BLM Ambon dan Pemerintah Daerah setempat dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Seram Bagian Barat.

III.4. Permasalahan Selama Kegiatan

Permasalahan ataupun kendala yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan peserta yang tidak seragam. Ada BUMDes yang belum beraktivitas, ada yang sudah berjalan dengan baik. Semestinya hal ini sudah bisa diidentifikasi saat penjurusan. Kebutuhan materi bagi kedua kelompok BUMDes tersebut akan sangat berbeda. Jauh lebih baik bila kelas pelatihan berisi peserta dengan latar belakang yang sama.
2. Terlalu banyak target yang harus dicapai dalam 1 kali pelatihan. Banyak mata latihan yang tidak mendalam penyajiannya dan sangat terbatas waktu prakteknya.

IV. PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim pengabdi dapat menyimpulkan bahwa kapasitas pengelola BUMDes tidak sesuai dengan besarnya tanggung jawab yang dipikul sehingga mengakibatkan aktivitas BUMDes tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat dipahami karena keterbatasan sumber daya di desa.

IV.2. Saran

Saran yang bisa diberikan tim pengabdi setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes masih harus mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Hal ini penting dilakukan mengingat tercapainya tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat desa akan sangat tergantung pada kapasitas pengelolanya
2. Lebih banyak pelatihan yang dibutuhkan sebagai salah satu upaya peningkatan kapasitas pengurus BUMDes. Fokus pelatihan sebaiknya hanya pada mata latih tertentu.
3. Hal lain yang mutlak dibutuhkan adalah “Pendampingan”. Pelatihan hanya bisa memberikan pengetahuan awal, proses pendampingan saat praktek dalam kondisi riil ketika mengelola BUMDes menjadi sangat penting agar tujuan pelatihan bisa tercapai.
4. Fokus pelatihan sebaiknya hanya pada mata latih tertentu.
5. Khusus untuk sistim akuntansi tidak maksimal jika hanya menjadi mata latih. BLM sebaiknya mempertimbangkan untuk khusus mengadakan pelatihan sistim akuntansi BUMDes kepada pengelola BUM Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Faedlulloh, D., 2018. 'BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris'. *Journal of Governance*, vol. 3, no. 1, hh. 1-17.
- Fatimah, P. I. R., 2018. 'Mengembangkan Kualitas Usaha Milik Desa (Q-BUMDES) Untuk Melestarikan Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa Dengan Menggunakan Model Tetrapreneur'. *Jurnal Studi Pemuda*, vol. 7, no. 2, hh. 122-132.
- Fifiyanti, Alyas, Mone, A., 2018. 'Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha milik Desa Di Desa Patani Kecamatan Mappkasunggu Kabupaten Takalar'. Kolaborasi: *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 4, no. 3, hh. 282-296.
- Kartika NKDC., Sinarwati, NK., dan Wahyuni, MA., 2017. 'Efektivitas Pengelolaan Dana Pada Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara Di Desa Sangan'. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, vol 8, no. 2.
- Kirowati, D., dan Lutfiyah, D. S., 2018. 'Penembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus : Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan)'. *Jurnal AKSI - Akuntansi dan Sistim Informasi*, vol. 1, no. 1, hh. 15-22.
- Nugraha, A., dan Kismartini., 2019. 'Evaluasi Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Rejo Mulyo, Desa Gogik, Kecamatan Unggaran Barat Kabupaten Semarang'. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 1, no. 1, hh. 43-56
- Prasetyo, R. A., 2016. 'Peranan Bumdes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro'. *Jurnal Dialektika*, vol. XI, no. 1, hh. 86-100.
- Zulkarnaen, R. M., 2016. 'Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta'. *Dharmakarya: Jurnal Ipteks untuk Masyarakat*, vol. 5. No. 1, hh. 1-4.